SUBJEK DAN RUANG LINGKUP PATEN SERTA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Obie Persada Sitanggang

185100057P

Fakultas Komputer, 448757208
obiepersada.student@umitra.ac.id

Abstract

Pada zaman sekarang ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Rusia dan Cina merupakan contoh negara yang sangat maju dalam bidang teknologi sehingga mereka mampu memberi pengaruh bagi negara lain. Negara-negara tersebut melindungi teknologi mereka secara ketat. Jadi jika ada seorang mahasiswa asing yang belajar dalam bidang teknologi di negara-negara tersebut, maka dosen tidak menularkan seluruh ilmunya kepada si mahasiswa tersebut. Karena itu, Indonesia perlu merangsang warga negaranya untuk mengembangkan teknologi dengan mengembangkan sistem perlindungan terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang berupa pemberian hak paten.

Dalam menghadapi era globalisasi ini, semua masyarakat baik dari kalangan atas, maupun bawah harus punya kemampuan di bidang teknologi. Banyak karya intelektual di bidang teknologi yang bisa membawa kenyamanan dan kemajuan di hidup masyarakat. Maka dari itu karya-karya ini perlu dihargai dan dilindungi dengan pemberian hak paten. Hak paten ini memerlukan perlindungan hukum, agar tidak ada pihak yang punya niat jelek untuk mengklaim dan menjadi heker. Oleh karenanya kami mengangkat materi Hak Paten untuk penyusunan makalah ini. Uraian materi akan dipaparkan secara rinci dalam artikel ini.

Kata Kunci : Hak Paten dan Teknologi.

A. INTRODUCTION

1. Sejarah Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Objek pengaturan hak cipta adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (inventions), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Sama halnya dengan hak cipta, kebutuhan perlindungan hukum bagi penemuan di bidang teknologi tersebut juga berakar pada sejarah yang cukup lama. Pada awalnya memang sekedar perlindungan yang bersifat monopolistik, dan memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14.

Teknologi ini sangat penting, karena merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Sebagai ilmu pengetahuan yang ditetapkan dalam proses industri, teknologi jelas lahir dari kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari segi nilai, kegiatan tersebut selalu melibatkan tenaga dan pikiran serta waktu dan juga biaya yang biasanya sangat besar. Karena hal tersebut diatas maka teknologi akan memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh sebab itu, wajar apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, perlu diketahui adanya terminologi baku yang diatur dalam undang-undang tersebut termasuk mengenai pengertian paten itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Paten menegaskan pengertian paten yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri intensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau prosesnya. Adapun inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Penjelasan undang-undang menegaskan bahwa istilah invensi digunakan untuk penemuan dan istilah inventor digunakan untuk penemunya.

2. Subjek Paten

Mengenai subjek paten Pasal 10 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

1. yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
2. jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 disebutkan:

1. pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali perjanjian lain;
2. ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi;
3. inventor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi

yang diperoleh dari invensi tersebut;

4. imbalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat dibayarkan;
 - a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. persentase;
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus;
 - e. bentuk lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk diberikan oleh Pengadilan Niaga;
6. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

Apabila invensi tersebut ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapat juga diberikan kepada badan hukum. Orang yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum di pengadilan.

Hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

1. pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;
2. dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan oleh penggunaan paten proses yang dimilikinya;
3. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Pemegang paten melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari suatu penemuan. Unsur yang terpenting terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap pemanfaatan hak tersebut secara menyeluruh dan utuh. Kurang tepat bilamana persoalannya kemudian dipisahkan dalam bentuk ekspor dan impor. Sebab ekspor dan impor adalah masalah tata niaga yang pada era WTO akan menjadi lebih terbuka tanpa dibatasi oleh dinding nasional.

3. Ruang Lingkup Perlindungan Paten

Mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, meliputi: penemuan yang dapat diberikan paten, penemuan

yang tidak dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten dan pengecualian terhadap pelaksanaan paten. Mengenai penemuan yang dapat diberikan paten menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001 menegaskan:

1. paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan kedalam industri;
2. suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;
3. penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Paten tidak diberikan untuk invensitentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan;
- c. teoridan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, proses biologi syngesensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.

Paten sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut

tidak diperpanjang. Adapun untuk paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut juga dapat diperpanjang.

4. Permohonan Paten

Paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan, yaitu:

- a. tanggal, bulan, dan permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jenis permohonan;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. judul invensi;
- h. klain yang terkandung dalam invensi;
- i. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi;
- k. abstrak invensi.

Selanjutnya atas setiap permohonan paten akan diumumkan oleh pemerintah yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala

oleh Ditjen HAKI dan atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

Atas permohonan yang diajukan, Ditjen HAKI akan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan. Untuk paten akan dikeluarkan keputusan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Atas paten yang diberikan, akan diterbitkan sertifikat paten yang merupakan bukti hak atas paten dan berlaku pada tanggal diberikannya sertifikat paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Terhadap permohonan paten yang ditolak dapat diajukan permohonan banding ke Komisi Banding Paten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Komisi Banding Paten merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman.

5. Pengalihan Lisensi Paten

Seperti diketahui bahwa paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagaimana hak milik tentunya paten dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 yang dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian tertulis;
5. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan tersebut tentunya tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Hak ini disebut hak moral.

Beberapa dari pengalihan paten yang pemilikan haknya juga beralih, pemegang paten juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi paten merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Lingkup lisensi meliputi semua perbuatan selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara RI. Dalam perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Ditjen HAKI untuk melaksanakan paten setelah lewat waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Permohonan tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan lisensi-wajib, tentu akan disertai dengan pembayaran royalti oleh penerima lisensi-wajib kepada pemegang paten. Royalti tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak. Besar royalti dilakukan dengan

memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau perjanjian lain yang sejenis yaitu perjanjian yang lazim dibuat dalam rangka pengalihan kemampuan atau pengalihan pengetahuan tentang teknologi yang tidak di patenkan. Lisensi-wajib akan berakhir apabila:

1. alasan yang dijadi-kandasar bagi pemberian lisensi-wajib tidak ada lagi;
2. penerim lisensi-wajib tidak melaksanakan lisensi-wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;
3. penerim lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi-wajib.

6. Pembatalan Paten

Undang-Undang Paten menegaskan bahwa ada 3 (tiga) macam pembatalan paten, yaitu *Pertama*, karena batal demi hukum, *Kedua*, batal atas permohonan pemegang paten, dan *Ketiga*, batal karena adanya gugatan. Paten yang dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HAKI kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Paten yang dinyatakan batal demi hukum ini akan dicatat dan diumumkan.

Untuk pembatalan paten atas permohonan pemegang paten dilakukan oleh Ditjen HAKI untuk seluruh atau sebagian atas permohonan paten yang diajukan. Atas

pembatalan paten ini tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Selanjutnya keputusan pembatalan paten tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HAKI seperti halnya batal demi hukum. Sedangkan untuk pembatalan paten karena gugatan terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga dalam hal paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang. Gugatan pembatalan dapat juga dilakukan oleh Jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi dalam hal pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.

Akibat hukum dari adanya pembatalan paten adalah :

- 1) akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut;
- 2) penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi yaitu penerima lisensi yang dibatalkan karena alasan paten yang digugat pembatalannya sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang;

- 3) penerimaan lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak. Apabila pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti sesuai dengan sisa jangka waktu pengguna lisensi kepada pemegang paten yang berhak.

7. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Pasal 99 Undang-Undang Paten menegaskan apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan yang akan ditetapkan dengan keputusan presiden. Contoh invensi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara antara lain bahan peledak, senjata dan amunisi. Sedangkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat mencakup antara lain bidang kesehatan seperti obat-obat yang masih dilindungi paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas; bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagal panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Pemerintah akan memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang

paten. Seandainya pemegang paten tidak setuju atas besarnya imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemegang paten dapat mengajukan gugatan atas ketidaksetujuannya kepada Pengadilan Niaga, namun gugatan tersebut tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah.

B. CONCLUSION

Paten sebagai benda immaterial dan sebagai bagian hak kekayaan perindustrian paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (Industrial Property Right). Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.

Paten atau oktroitelah ada sejak abad XIV dan XV, contohnya di negara Italia dan Inggris. Sifat pemberian hak ini pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu temuan atau invensi (uitvinding) namun diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri.

Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Mengenai subjek paten Pasal 10 Undang-Undang Paten No.14 Tahun 2001 menyebutkan permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4. Prosedur permintaan paten berdasarkan Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001 adalah permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4. Undang-Undang Paten menegaskan bahwa ada 3 (tiga) macam pembatalan

paten yaitu pertama, karena batal demi hukum, kedua, batal atas permohonan pemegang paten, dan ketiga, batal karena adanya gugatan.

C. ACKNOWLEDGEMENT

University Of Indonesia
University Of Mitra Indonesia
Telkom University
University Of Melbourne
Saitama University

D. REFERENCE (Based ISO 690)

- [1] A. S. Putra And O. M. Febriani, "Knowledge Management Online Application In Pdam Lampung Province," In *Prosiding International Conference On Information Technology And Business (Icibt)*, 2018, Pp. 181–187.
- [2] A. S. Putra, O. M. Febriani, And B. Bachry, "Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung," *J. Sist. Inf. Dan Manaj. Basis Data*, Vol. 1, No. 1, Pp. 21–30, 2018.
- [3] O. M. Febriani And A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, Vol. 13, No. 1, Pp. 90–98, 2014.
- [4] Putra, Arie Setya. "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer." (2018).
- [5] Putra, A. S. (2018, July 17). Paperplain Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra

Indonesia. Retrieved From
Osf.Io/Pbrn9.

E. REFERENCE (Based APA)

Putra, A. S., Aryanti, D. R., & Hartati, I. (2018, November). Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya). In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 85-97).

Sari, D. P., Febriani, O. M., & Putra, A. S. (2018, November). Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 289-294).

Putra, A. S. (2018). Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia.

Putra, A. S., Sukri, H., & Zuhri, K. Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel. *IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems)*, 8(2), 221-232.

Darmawan, A., Yuliawati, D., Marcella, O., & Firmadala, R. (2016). Sistem Absensi dan Pelaporan Berbasis Fingerprint dan SMS Gateway. *EXPLORE*, 7(1).

Febriani, O. M., Wahyuni, T., & Yusuf, S. (2017). DESIGN OF WEBSITE-BASED INFORMATION SYSTEM FOR EDOCUMENT ADMINISTRASI IN THE

COMMUNITY SERVICE UNIT (A Case Study at Rajabasa District). *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS & TECHNOLOGY*, 16(7), 7010-7020.

Febriani, O. M., & Wahyuni, T. (2017, October). PERANCANGAN SISTEM E-DOCUMENT ADMINISTRASI LOGBOOK PENELITIAN PADA UNIT LAYANAN DI BANDAR LAMPUNG. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 187-194).

Febriani, O. M., & Permadi, A. B. (2017). Implementasi Sistem Aplikasi Data Bimbingan dan Pelanggaran Siswa pada Sekolah Menengah Atas di Lampung Tengah dengan Metode Analisis dan Desain Sistem Terdistribusi (SSAD). *EXPERT*, 7(1).

Febriani, O. M., & Ambarwati, L. (2015). PERANCANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN UKM KELANTING KHAS TELO DESA SIDOHARJO KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis Pengabdian Masyarakat Darmajaya*, 1(1), 77-95.

Febriani, O. M. (2015). Rancang Bangun Aplikasi E-commerce menggunakan Freewebstore pada UKM Kelanting di Desa Sidoharjo Lampung Selatan. *Prosiding Sembistek 2014*, 1(02), 446-458.